

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI POTENSI DESA (STUDI KASUS DI DESA PARUNGSERAB KABUPATEN BANDUNG)

**Siti Widharetno Mursalim**

Dosen Universitas Sangga Buana  
e-mail: siti.widharetno@yahoo.com

**Endah Mustika Ramdani**

Dosen STIA LAN Bandung  
e-mail: endahmustika@gmail.com

### Abstrak

Di tengah perkembangan media informasi, pemberdayaan selanjutnya mendapat sandingan baru yaitu pemberdayaan informasi. Pemberdayaan informasi merupakan pola komunikasi yang dibangun oleh masyarakat dalam menginformasikan apa yang terjadi pada dirinya dan lingkungannya. Pemberdayaan informasi dibangun dari bentuk kepedulian masyarakat terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Pemberdayaan informasi membawa masyarakat lebih peduli kepada orang lain, daripada berfikir diri sendiri seperti dalam konteks ekonomi—sebelum orang lain, diri sendiri dulu yang mapan. Dalam konteks informasi, kini masyarakat harus memperlakukan dunia informasi bukan sebagai alat untuk mendapatkannya, tetapi sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu. Jika beberapa saat ke belakang kita berada di abad informasi, siapa yang banyak informasi dialah yang menguasai dunia, namun kini kita berada di abad kreatifitas, artinya siapa yang bisa mengisi (memberikan) informasi maka dialah yang dianggap eksis oleh dunia. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi dapat dilaksanakan untuk mendukung program promosi potensi desa.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Promosi Potensi Desa Parung Serab belum berkembang dengan baik. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin yang dapat menggerakkan potensi masyarakat dan membantunya untuk memberikan keilmuan tentang bagaimana mereka dapat menshare kegiatannya, budayanya, dan informasi-informasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat melalui berbagai macam bentuk baik kegiatan maupun media.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Masyarakat, Potensi Desa

### *Community Empowerment In promoting Village Potention (A Case Study of Community Empowerment In Promoting Village at Parung Serab Village, Bandung District)*

### Abstract

*In the midst of media information, things that need to be empowered is information. Empowering information is a process of communication that was built by the community in informing what happened to him and his surrounding. It was built from public awareness of other people or the environment. The empowerment of information can bring other people to be more concerned to others, rather than think of oneself as in the economic context - before others, you must be established first. Today, in the context of information, the community must treat information not as a means to get it, but as a means to convey something. Community empowerment through information can be implemented to support the in promoting of rural potential.*

*The research method used in this study is a qualitative study. The results showed that the In Promoting of Parung Serab Village potentials is not well developed. The process of community empowerment should be accompanied by information empowerment facilitator of multidisciplinary teams that have the ability to promote the potential of the community and region where he was assigned. The facilitator should be able to share their knowledge to the public about how they shared activities, cultural and other information through the sharing of media.*

**Keywords:** Empowerment, Community, Potention

### A. LATAR BELAKANG

Dahulu, kesenjangan informasi dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator kemiskinan. “Kesenjangan informasi menunjukkan ketidakmampuan mengakses dan meng-

gunakan informasi yang akan berdampak pada kesejahteraan seseorang. Karenanya, di abad ini masyarakat tidak hanya puas dengan akses informasi yang didapat secara mudah, tetapi harus mampu memberikan konten

(informasi) kepada orang lain. Dengan kata lain, produktifitas sangat dituntut oleh media saat ini agar masyarakat diperhitungkan dan dianggap eksis. Di sinilah fungsi media informasi hadir untuk menjadi jembatan antar masyarakat – bukan masyarakat dan negara. Sebagai sarana, media informasi tentu di sini hadir tidak sebagai *entitas* yang mati, tetapi hidup dan memberikan solusi atas problem masyarakat yang terjadi selama ini. Yang menjadi modal bagi masyarakat adalah penguasaan mereka atas kondisi sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dengan modal ini mereka sangat paham apa yang perlu *dishare* kepada publik, apa persoalan mereka dan apa potensi mereka. Dalam membangun sinergi, apa yang perlu dibantu orang lain dan apa yang dibutuhkan pihak lain tetapi ada di desa mereka.

Kurangnya akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat disebabkan oleh dua permasalahan pokok. Pertama karena informasi yang masih bersifat eksklusif (dengan sengaja informasi tidak disebar kepada umum). Ketiadaan akses masyarakat terhadap informasi jenis ini perlu dibantu oleh pemerintah dengan lebih mensosialisasikan informasi “mahal” tersebut kepada masyarakat misalnya melalui brosur, koran, radio dan televisi. Kedua adalah kelemahan masyarakat sendiri dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh motivasi masyarakat yang rendah untuk mengakses informasi tersebut. Dalam kasus kedua ini pemberdayaan dapat diupayakan dengan kampanye pentingnya informasi bagi masyarakat.

Namun, saat ini permasalahannya bukan hanya sebatas mampu atau tidaknya suatu masyarakat mengakses dan menggunakan informasi tersebut, namun masyarakat dalam hal ini harus memposisikan diri sebagai sumber informasi.

Berapa banyak kebijakan dari pemerintah yang tidak dapat menyelesaikan masalah di dalam masyarakat lantas tidak dipatuhi oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya ketidaktahuan pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya. Untuk itu masyarakat disini harus mampu menyampaikan informasi terkait dengan dirinya dan lingkungan, bisa tentang budayanya, isu terkini di daerahnya, potensi wilayahnya, dan lain sebagainya.

Saat ini juga banyak Lembaga Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan program kegiatannya mencantumkan atau

mengatasnamakan pemberdayaan masyarakat dan yang lebih memprihatinkan bahwa yang mengetahui proses, prosedur, rencana kegiatan sampai dengan pelaksanaannya hanya sebatas pada Lembaga tersebut.

Banyak Lembaga lainnya, LSM, kelompok pemerhati belum begitu memahami tentang konsep pemberdayaan yang dilaksanakan sehingga ada sebagian yang *apriori* terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, karena prinsip transparansi dan keikutsertaan lembaga atau komponen masyarakat lainnya kurang diterapkan secara maksimal.

Sebelum mengupas lebih jauh, perlu ada pemahaman yang sama tentang pemberdayaan masyarakat agar semua pihak dapat memahami arti sebenarnya, sehingga diharapkan dalam setiap pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh dan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and a sustaniable*”.

Istilah pemberdayaan sering sekali di dengar dalam program-program pemerintah. Pemberdayaan diartikan sebagai *helping people to help themselves*. Lebih lanjutnya dapat dikatakan sebagai upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai ‘*power*’ (*driving’s force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self development*). Namun, dalam perkembangannya pemberdayaan masyarakat seringkali di-sandingkan dengan memberdayakan secara ekonomi. Padahal memberdayakan dapat dilakukan dalam berbagai aspek tidak hanya ekonomi saja.

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS yang terdiri dari:

1. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
2. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan

dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.

3. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
4. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
5. *Responsibility* atau tanggung jawab, yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
6. *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik'.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi sudah mulai dikembangkan oleh beberapa Desa di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satunya di Desa Parung Serab Kabupaten Bandung. Dengan berbagai potensi yang dimiliki Desa Parung Serab seperti pertanian, peternakan, industry dan sebagainya, membuat promosi potensi desa menjadi hal yang penting untuk dikembangkan dalam pembangunan potensi desa. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat membuat pemerintah desa perlu memikirkan media informasi yang tepat terutama kaitan dengan informasi potensi desa.

## B. LANDASAN TEORITIS

Konsep Desa menurut Bintarto, Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. (Bintarto, 1985).

Selanjutnya Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri

dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.

2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya. (Bintarto, 1985)

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang dapat diartikan sebagai pemberkuasaan. Menurut Chambers dalam Huraerah, konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable.*" (Huraerah, 2011: 95). Selanjutnya, Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai '*power*' (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self development*).

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Dharmawan (2007) mengutip pendapat Fear dan Schwarzweller (1985) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai:

*"a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others"*

Dalam hubungan ini, (Robbins, Chatterjee & Canda, 1998) secara singkat menyatakan sebagai berikut:

*Empowerment, "process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals".*

Makna kata "*gain*" atau "*memperoleh*" daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya dan itu berasal dari masyarakat. Masyarakat berusaha, mencari, melakukan, menciptakan atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kemampuan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996). Selain itu, konsep pemberdayaan juga

dikemukakan oleh banyak kalangan diantaranya oleh Rappaport (Weissberg, 1999) mengartikan:

*"Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives."*

Schneider (1999) menyatakan bahwa:

*"Empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber, Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally "taking over power from somebody else" at the purely political level. This means, it includes knowledge, education, organization, rights, and 'voice' as well as financial and material resources."*

Hacker, 1999 menyebutnya:

*"Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship. Unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and widening of individual's opportunities"*.

Osmani (2000), memberdayakan pemberdayaan sebagai:

*"Empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance."*

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, Dharmawan (2000) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai:

*"A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living."*

Berdasarkan konsep-konsep mengenai pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. (Winarni, 1998:75). Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan kondisi yang membuat potensi masyarakat berkembang. Karena tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, namun terkadang masyarakat tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. (Winarni, 1998 :76)

Konsep pemberdayaan sebenarnya mengandung unsur partisipasi masyarakat,

yaitu bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu/masyarakat yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003 : 44).

Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah bagaimana membentuk masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian disini diantaranya kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang masyarakat lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang ada. Terciptanya keberdayaan masyarakat akan memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan.

Konsep pemberdayaan merupakan konsep perubahan yang direncanakan (*planned change*). Perubahan sosial merupakan kajian dinamika sosial. Istilah perubahan sosial diambil dari bahasa Inggris, yaitu *social change*. Pada awalnya, perubahan sosial didefinisikan oleh Ibnu Khaldun dalam Martono sebagai berikut, "Masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden menuju masyarakat (yang tinggal) menetap (disebut sebagai masyarakat kota)." (Martono, 2012: 1-2).

Wan Hasim dalam Garna mengartikan, "Perubahan sosial sebagai sebaran penyesuaian yang berlaku kepada pola-pola interaksi antara individu-individu sebagai unit sosial dalam sebuah masyarakat." (Garna, 1992: 13). Selanjutnya Moore dalam Anwar mengartikan, "Perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial meliputi pola-pola perilaku dan interaksi sosial, termasuk norma, nilai, dan fenomena kultural." (Anwar: 2007: 51). Adapun menurut Martono, "Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan." (Martono, 2012: 2).

Selain itu Selo Soemardjan, mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok

dalam masyarakat (Selo Soemardjan 1962 dalam Soekanto, 2007 :263). Perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dan masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Perubahan di masyarakat merupakan suatu proses yang terus menerus (Taneko, 1984 :133). Artinya bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan itu, akan tetapi perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama, ada masyarakat yang mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu.

Mengenai perubahan sosial ini Sztompka menjelaskan, “konsep dasar mengenai perubahan sosial menyangkut tiga hal, yaitu: pertama, studi mengenai perbedaan; kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. (Martono, 2012 : 2).

Selanjutnya Martono menjelaskan bahwa, “Untuk dapat melakukan studi perubahan sosial, kita harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kedua, studi perubahan harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, dengan kata lain harus melibatkan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Ketiga, objek yang menjadi fokus komparasi tersebut haruslah objek yang sama.” (Martono, 2012: 2-3).

Martono juga menjelaskan, “Dimensi waktu dalam studi perubahan sosial meliputi konteks masa lalu (*past*), sekarang (*present*), dan masa depan (*future*).” (Martono, 2012: 3). Studi perubahan sosial mengamati perubahan dengan kondisi masa lalu dan masa sekarang. Studi perubahan sosial juga dapat meliputi kondisi masa depan (*future*) atau melakukan proyeksi tentang masa yang akan datang dengan studi penelusuran sejarah, serta didukung dengan berbagai data (*statistik*) yang tersedia mengenai kondisi masa lalu dan sekarang.

Agar masyarakat mampu melakukan perubahan sosial, Hagen berpendapat bahwa, “Proses perubahan berkaitan erat dengan individu yang kreatif, yang menciptakan sejenis hubungan sosial khusus sepanjang waktu, untuk itu perubahan sosial takkan terjadi tanpa ada perubahan kepribadian.” (Anwar, 2007: 51). Teori Hagen tersebut, menempatkan pendidikan sebagai posisi yang strategis dalam perubahan sosial atau pembangunan. Menurut

Hagen, “titik awal dari perubahan sosial adalah pendidikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan peran individu dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi dirinya.” (Anwar, 2007: 51).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan metode studi kasus dilihat dari tingkat eksplanasinya, seperti dikemukakan Mikes dan Huberman (2009) pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

Pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan, lebih ditekankan untuk:

1. Memahami pemberdayaan masyarakat melalui informasi di Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
2. Mengungkapkan dan memahami kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat melalui informasi di Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Guna menunjang metode penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari dan menganalisis beberapa literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Studi Lapangan, yaitu suatu cara untuk mendapat data dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi pembahasan masalah yang diteliti langsung pada objek penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
  - a. Observasi, berdasarkan ciri khasnya, penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan/observasi langsung dari peneliti. Pengamatan/observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui informasi di Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
  - b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), proses atau upaya untuk

mendapatkan data yang diperlukan melalui tanya jawab langsung dengan berbagai pihak yang terkait penelitian, seperti pihak terkait di Pemerintah Desa Parung Serab Kabupaten Bandung, dan Tokoh Masyarakat.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* yaitu orang yang memiliki pengetahuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta mendapatkan data yang spesifik dari pemberdayaan masyarakat melalui informasi di Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus memiliki banyak pengalaman tentang masalah penelitian dan secara sukarela menjadi sumber informasi meskipun tidak secara formal, mereka dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Berikut ini yang merupakan kelompok Informan kunci dari pemberdayaan masyarakat melalui informasi di Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

1. Kepala Desa Pemerintah Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
2. Kepala BPD Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
3. Tokoh Masyarakat.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat.

Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka terhadap beberapa fasilitas diantaranya adalah informasi.

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga

meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabdikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat.

Proposisi di atas mengindikasikan pula bahwa inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi di sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “obyek”, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai “subyek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Karena itu pemberdayaan menilai tinggi dan mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan lokal.

Subejo dan Narimo (2004) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial”.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam

rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya dari menciptakan iklim dan suasana. penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Terdapat beberapa bias-bias pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat sehingga menyebabkan tujuan dari pemberdayaan itu tidak tercapai, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bias pertama adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.

Bias kedua adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan ditingkat bawah (*grass-root*). Akibatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup dimasyarakat.

Bias ketiga adalah bahwa pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia dan mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Bias keempat adalah anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang

berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang di satu pihak terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. Di lain pihak, pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias kelima adalah anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah itu kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias keenam adalah bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi tidak kena terhadap sasaran, tidak memecahkan masalah dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias ketujuh berkaitan dengan di atas, adalah bahwa orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (*charity*) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Bias kedelapan adalah ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan, padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang

lebih lestari (*sustainable*), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (*time frame*) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

Bias kesembilan adalah anggapan bahwa sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan modal besar-besaran di sektor itu. Berkaitan dengan itu, bermitra dengan petani dan usaha-usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki resiko tinggi. Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.

Bias kesepuluh berkaitan dengan di atas, adalah ketidakseimbangan dalam akses kepada sumber dana. Kecenderungan menabung pada rakyat, yang cukup tinggi di Indonesia seperti tercermin pada perbandingan tabungan masyarakat dengan PDB (di atas 30% termasuk salah satu tingkat tertinggi di dunia), acapkali terasa tidak seimbang dengan kebijakan investasi melalui sektor perbankan yang lebih terpusat pada investasi besar, dan sebagian cukup diantaranya untuk investasi di sektor properti yang bersifat sangat spekulatif. Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. Pengalaman Taiwan dan Jepang sebelumnya menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.

Dari bias-bias tersebut dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat diposisikan sebagai objek dan dalam hal ini seharusnya masyarakat digali potensinya, diberikan kepercayaan sehingga mereka dapat menginformasikan kepada dunia terkait dengan keberadaan mereka beserta potensi yang mereka miliki.

Aditya (2003), mengungkapkan beragam dilema dalam pelaksanaannya, Pertama, harus diakui sejak awal 1990-an, Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan (*alleviation poverty and poverty reduction*). Upaya

ini dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. Di satu sisi, kemiskinan dipandang sebagai keadaan absolut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan diseragamkan lalu dipakai sebagai dasar menyusun proyek pengentasannya. Pada kenyataannya kemiskinan memberikan wajahnya yang relatif. Kemiskinan juga menyangkut bagaimana kondisi sosial mendefinisikannya. Seseorang bisa jadi tidak miskin dalam kehidupan komunitas kultural dan geografis tertentu meski secara absolut didefinisikan sebagai miskin. Artinya upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhadapan dengan kenyataan yang pasti.

*Ketiga*, berkaitan dengan relativitas dalam mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan merupakan masalah tersendiri, karena keberhasilan sendiri masih diperdebatkan dalam konteks teknis dan substantif. Evaluasi proyek pemberdayaan hampir selalu dilakukan dengan mengukur keberhasilan yang menyangkut bagaimana sebuah program dilaksanakan serta bagaimana anggaran yang direncanakan dapat diimplementasikan namun sering luput melihat sisi substansial dari tujuan pemberdayaan itu sendiri. Sementara itu dilain pihak substansi pemberdayaan sendiri terus diperdebatkan menyangkut pemahaman akan masyarakat yang berdaya dan siapa yang mendefinisikannya.

Bentuk-bentuk upaya pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan seringkali justru tidak menjawab masalah ketidakberdayaan itu. Pemberian bantuan yang biasanya berupa sejumlah dana sebenarnya justru membuat upaya pemberdayaan melahirkan ketergantungan baru. Sekalipun bentuk bantuan yang diberikan sebenarnya ditujukan sebagai pemicu bangkitnya keberdayaan namun seringkali melahirkan mentalitas penerima, bukan penggerak dalam masyarakat yang menjadi sasarannya. Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya melalui informasi, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar mampu menghasilkan informasi.

*Keempat*, menyangkut keberlanjutan program/kegiatan. Di satu pihak, banyak program/kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu dimana masyarakat sasaran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk

ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan yang dilakukan, ternyata tidak terjaga keberlanjutannya. Di lain pihak, pemberdayaan yang oleh organisasi di luar pemerintah mencoba menjawab masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang menyatakan perlunya membangun kesadaran kritis dalam masyarakat dalam bentuk penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi. Dalam kondisi tertentu upaya ini mampu menjawab problem ketergantungan namun dalam kondisi tertentu pula upaya ini menjadi lambat bergerak.

*Kelima*, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan boleh dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. Artinya masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri.

*Keenam*, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena yang cukup menarik. Banyak pihak coba dilibatkan untuk menjalin kerjasama mewujudkan keberdayaan. Namun program ini akan menjadi sia-sia kalau masing-masing pihak tidak berada dalam kapasitas yang setara. Dominasi akan membuat kerjasama menjadi timpang, konsensus tidak terwujud dalam keadilan, dan kenyataannya sangat sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama.

*Ketujuh*, isu globalisasi, menghadapkan negara tentang pentingnya pasar dan upaya-upaya untuk menyusutkan peran negara. Padahal. Ketidakberdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan baru dimana negara hanya akan menjadi penonton saja. Kritik Pierra Bourdie atas paham ini menyebutkan bahwa dunia akan berada dalam kondisi sebagaimana teori Darwin tentang seleksi alam (*the survival of the fittest*) dimana yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya.

*Kedelapan*, dalam konteks Indonesia, negara kesejahteraan (*welfare state*) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dilema yang dihadapi bangsa Indonesia adalah karena kita punya konsepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya.

Untuk itu perlu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai instrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan yang khas pada masyarakat Indonesia (dan beberapa negara yang lain) adalah kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut dengan ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.

Apabila melihat profil Desa Parung Serab, Desa Parung Serab adalah terdiri dari 4 dusun yang masing-masing mewadahi beberapa perdukuan dengan jumlah penduduk yaitu 7.752 jiwa dari 3.861 jiwa laki-laki dan 3.891 jiwa perempuan, desa Parung Serab ini tersusun dengan 16 RW dan 50 RT. Berikut ini adalah potensi Desa yang dimiliki di Desa Parung Serab.

1. Industri konveksi baju muslim dan jasa jahit baju perkantoran skala usaha rumah tangga yang telah menembus pasar regional. Komoditi konveksi desa Parung Serab merupakan produk busana muslim yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jenis kebutuhan bahan baku per tahun adalah 800 meter kain, benang, kancing dan *resleting*. Mesin yang digunakan untuk memproduksi adalah mesin jahit, mesin obras, gunting dan jarum. Pemasaran konveksi dilakukan di Pasar Soreang dan untuk baju perkantoran dipasarkan di lingkungan SKPD Kabupaten Bandung.
2. Memiliki potensi pertanian yang cukup berkembang, dengan system 3 kali panen setiap tahunnya dengan luas 123,89 Ha, 2 kali panen untuk komoditas padi dan satu kali panen untuk komoditas sayur-sayuran. Pertanian di desa ini memiliki lahan 123 hektar yang dibagi 2 pengairan yaitu Pengairan Teknis dan Pengairan Non Teknis. Komoditas yang terdapat adalah padi dan sayuran. Tenaga kerjanya mencapai 367 orang petani. Pertanian di Parung Serab tergantung pada musimnya. Dari tahap awal sampai akhir padi membutuhkan waktu 4 bulan yaitu penyemaian, pengolahan tanah seperti di bajak dengan kerbau terlebih dahulu setelah itu diratakan kemudian ditanam, diberi pupuk agar padi subur, penyiangan (membuang tanaman pengganggu),antisipasi hama seperti penyemprotan dan tahap terakhir panen. Ada pula jasa pertanian yaitu kegiatan usaha penyediaan jasa penunjang produksi pertanian pasca panen seperti pengelolaan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pembibitan tanaman, penyewaan traktor, jasa penggilingan padi dan sebagainya.
3. Memiliki potensi peternakan, Kambing 19 ekor, Domba 64 ekor, Ayam 2828 ekor, Bebek 1642, dan Kelinci 207 ekor. Peternakan Kambing merupakan jenis peternakan yang mulai dikembangkan di Desa Parung Serab. Jumlahnya saat ini baru 19 ekor dengan jumlah pemilik sebanyak 4 orang. Kambing merupakan binatang memamah biak yang berukuran sedang. Makanan kambing adalah rumput. Setiap 1,5 tahun bisa melahirkan 2 atau 3 anak sekaligus. Peternakan Bebek sampai tahun 2015 terdapat 1642 ekor dengan 6 orang peternak. Untuk pemasarannya, para peternak menjual langsung kepada pembeli, tidak melalui KUD atau dijual dipasar. Bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian besar berukuran lebih kecil dibandingkan angsa dan angsa berleher pendek. Banyak teknik pemeliharaan bebek yang perlu dipelajari oleh peternak. Di dalam perawatannya diberi vaksin dan pengobatan tradisonal. Selain itu, kandang juga harus disemprot atau dibersihkan beberapa bulan sekali. Peternakan Ayam adalah peternakan terbesar di desa Parung Serab yaitu sebanyak 2828 ekor dengan 119 orang peternak. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharanya. Ayam tersebut juga diberi vaksin agar tidak terserang penyakit dan pertumbuhannya juga stabil. Harganya di jual perkilogram dengan harga 1 kilogram minimal Rp. 18.000 sampai Rp. 23.000 karena harganya belum stabil.
4. Desa Parung Serab memiliki potensi produk makanan olahan yang berbahan dasar dari singkong, seperti kicimpring, aliagrem, kerupuk aci. Pemasaran makanan olahan ini sudah mencapai Garut, Kota Bandung dan Cimahi, sedangkan untuk kerupuk aci sudah dipasarkan sampai ke Cianjur.
5. Tersedianya fasilitas olah raga yang melayani skala lingkungan Desa Parung Serab.
6. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup luas untuk konservasi.
7. Kebutuhan listrik baik untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) maupun kebutuhan industri telah terpenuhi PLN.
8. Tersedianya fasilitas peribadatan sekelas mesjid Jami yang lengkap dan mampu menjangkau pelayanan seluruh masyarakat Desa Parung Serab. Tempat peribadatan adalah bangunan/ruangan yang lokasiya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan bangunan. Termasuk bangunan /ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Ada sebanyak 20 Mesjid Jami, dan 8 buah Mushola di Desa Parung Serab.
9. Pelayanan pendidikan di Desa Parung Serab yang sudah memeadai, didukung

oleh Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).

**Tabel 1 Daftar Sarana Pendidikan  
Desa Parung Serab**

No	Sarana Pendidikan	Keterangan
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	5 unit 134 orang murid 16 orang pengajar
2.	PAUD	4 unit 96 orang murid 12 orang pengajar
3.	Madrasah Diniyah	9 unit 765 orang murid 56 orang pengajar
4.	Sekolah Dasar Negeri	3 unit 1068 orang murid 49 orang pengajar
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta	1 unit 150 orang murid 15 orang pengajar

Sumber: Profil Desa Parung Serab 2015

10. Aktivitas masyarakat didukung oleh jaringan jalan dalam kondisi baik, meliputi jalan kolektor, jalan lingkungan, dan jalan setapak.
11. Terdapat akses jalan menuju Tol Seroja dan akses jalan menuju Stadion Jalak Harupat yang mengungkan untuk sektor perdagangan.
12. Industri Meubel kusen pintu dan kusen jendela yang sudah dipasarkan ke tingkat regional.
13. Desa Parung Serab memiliki potensi Kesenian dengan 10 buah sanggar seni dan 143 orang seniman.
14. Jasa Pertukangan sebanyak 212 orang.

Desa parung serab memiliki beberapa potensi yang diunggulkan diantaranya pertanian yang saat ini masih menjadi potensi dominan di desa parung serab. Apabila musim berganti pertanian bergeser menjadi palawija. Dari data yang diperoleh masyarakat parung serab ada sekitar 53% yang bergerak di bidang pertanian.

Selain pertanian potensi lain adalah home industry yaitu konveksi, meubeul/kerajinan kayu, dan beberapa berkembang di makanan olahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Parung serab untuk mengembangkan potensi desa adalah dengan melakukan pengarahannya kepada masyarakat desa pada saat kegiatan-kegiatan pertemuan seperti pada saat rapat atau kegiatan keagamaan. Kepala desa selalu memberikan informasi mengenai potensi dan peluang-peluang kepada masyarakat.

Namun sayangnya ketika kegiatan pengarahannya tersebut hanya beberapa tokoh masyarakat yang hadir, sehingga tidak langsung tersampaikan kepada masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa pada wawancara berikut "Kami perangkat desa selalu menginformasikan potensi dan peluang, tetapi antusias masyarakat bermacam-macam, sebagian ada yang pro aktif tapi kebanyakan tidak pro aktif". (wawancara, 2016).

Upaya untuk membangun potensi dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dirasa masih sulit saat ini karena mayoritas masyarakat desa parung serab sedang mengalami peralihan. Semenjak tahun 2015 banyak lahan desa parung serab yang beralih fungsi menjadi lahan pembangunan seperti adanya akses Tol yang dan akses jalak harupat yang sebagian besar mengambil lahan dari desa parung serab ini, sedikit banyak hal ini cukup merubah pola pikir masyarakat desa, yang dahulu berpikir tradisional saat ini mulai berubah menjadi pola pikir modern. Mata pencaharian yang tadinya pertanian mulai beralih karena lahan pertanian sudah berkurang akibat adanya pembangunan, bahkan untuk tahun 2015 sudah 3 musim mata pencaharian bidang pertanian yang berkurang. Adanya perubahan pola pikir, kehidupan sosial di masyarakat desa parung serab tetapi tidak diimbangi kesiapan mental, keterampilan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan minat masyarakat terhadap potensi desa parung serab.

Dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan informasi, masyarakat dapat memahami secara umum kondisi, masalah dan potensi Desa Parung Serab, masyarakat dapat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang dilaksanakan di wilayah Desa Parung Serab, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program yang berkaitan dengan potensi desa.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok

adalah sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, amupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah untuk selanjutnya hasil-hasil tersebut dapat menjadi sumber informasi untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Untuk itu perlu ada program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan harus menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Friedman (1992) menyatakan:

*He empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis an autonomy is the decision-marking of territorially organized communitie, local selfreliance (but not autarchy),direct (participatory) democracy, and experiential social learning”.*

Pemberdayaan masyarakat desa didukung pula oleh Adanya sumber kemajuan ekonomi modal, teknologi informasi, sarana prasarana, kerja keras dan gotong rotong serta, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sumber ekonomi modal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan potensi desa. Untuk ekonomi masyarakat desa parung serab sudah didukung oleh dana desa baik yang berasal dari Pemerintah pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Hanya saja pemerintah desa mengalami kendala dalam proses administratif dan pertanggungjawab pengelolaan keuangan sehingga yang dibutuhkan oleh Desa sebenarnya adalah bukan hanya dana materi saja, tetapi dukungan pembinaan, pelatihan baik kepada aparatur desa yang mengelola anggaran juga kepada

masyarakat agar lebih aktif dalam proses pembangunan. Kendala lain yang dialami oleh Desa Parung Serab kaitan dengan modal adalah desa parung serab ini tidak memiliki “Carik Desa” seperti desa-desa lain di Kabupaten Bandung, sementara banyak sekali kebutuhan desa yang sifatnya *non budgeter*.

Dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini, tentunya masyarakat parung serab membutuhkan informasi yang cepat dan akurat, yang digunakan untuk sebagai media promosi, komunikasi, interaksi dengan masyarakat parung serab, tujuannya adalah selain mendapatkan informasi mengenai potensi desa, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa parung serab.

Promosi potensi Desa Parung Serab sejauh ini dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya, dengan menggunakan *famplet*, brosur, dan penyampaian informasi dari mulut ke mulut. Seperti pada potensi pertanian sayuran dan peternakan bebek dan ayam. Untuk menyebarluaskan kepada masyarakat luas mengenai keunggulan potensi pertanian dan peternakan yang dilakukan sejauh ini adalah menggunakan media brosur dan *famplet* yang disebarkan kepada masyarakat pada acara-acara tertentu, seperti acara-acara desa atau pada saat membuka *stand* di kegiatan pameran Pemerintah Kabupaten Bandung. Brosur mengenai pertanian sayuran dan peternakan memuat informasi mengenai keunggulan hasil pertanian dan peternakan, pengolahan, kemitraan juga jangkauan pemasaran. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Desa Parung Serab “Untuk beberapa potensi desa kami buat brosur yang kami bagikan kepada masyarakat dalam maupun luar Kabupaten Bandung, kepada perwakilan SKPD sebagai promosi potensi desa.”(wawancara, 2016) Dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat tersebut diketahui bahwa untuk promosi potensi desa menggunakan brosur/pamflet baru dilakukan untuk potensi di bidang pertanian dan peternakan saja, padahal untuk potensi lainnya akan lebih berkembang apabila dilakukan pula penyebarluasan informasi potensi desa. Kendala yang dialami dalam penyebaran informasi melalui media brosur dan *famplet* ini, sasaran penyebaran brosur adalah masyarakat yang sama setiap termin pembagian brosur, dan muatan informasi di dalam brosur tidak ter *update* setiap cetakan baru. Respon masyarakat dan penerima informasi, berdasarkan kroscek

yang dilakukan ke salah satu masyarakat dan perwakilan dari konsumen pengguna/pembeli hewan peternakan, mereka cenderung hanya melihat sekilas dan tidak tertarik untuk membaca brosur sampai dengan halaman terakhir bahkan tidak lama kemudian brosur tersebut lalu dibuang. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah membutuhkan informasi dalam bentuk lain karena informasi yang diterima melalui brosur berisikan informasi yang selalu sama.

Penyebarluasan informasi potensi desa selain dengan brosur adalah melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Cara ini digunakan untuk promosi potensi desa Parung Serab Makanan Olahan. Makanan olahan yang terkenal dan diunggulkan di Desa Parung Serab diantaranya makanan olahan dari singkong seperti kicimpring, aliagrem dan kerupuk aci. Selain olahan singkong juga makanan olahan "Pindang Parung Serab". Tanpa menggunakan media masyarakat sudah mengetahui keunggulan makanan olahan ini, karena kekhasan makanan yang berasal dari Desa Parung Serab. Bahkan untuk makanan olahan kerupuk aci, termasuk dalam usaha skala menengah dan pemasarannya sampai ke Cianjur.

Masyarakat saat ini cenderung menginginkan informasi yang cepat dan akurat seperti melalui teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Untuk pengembangan potensi desa dengan teknologi informasi di desa parung serab, sudah mulai dilakukan hanya saja informasi potensi desa ini baru dilakukan oleh beberapa masyarakat yaitu hanya generasi muda saja melalui media internet dan mayoritas untuk kebutuhan usaha pribadi, hal ini dilakukan terkadang tanpa sepengetahuan pemerintah desa, sehingga tidak ada laporan yang diberikan oleh masyarakat mengenai *sharing* potensi desa yang sudah dilakukan. Sedangkan untuk meningkatkan pembangunan desa parung serab dibutuhkan adanya promosi, berupa informasi yang berkaitan dengan potensi desa parung serab.

Potensi desa Parungserab yang menggunakan media teknologi informasi online adalah potensi konveksi baju muslim dan potensi mebel. Potensi konveksi baju muslim Desa Parungserab sudah berjalan semenjak tahun 2012. Usaha baju muslim ini berawal dari usaha rumahan keluarga yang kemudian berkembang diikuti oleh beberapa warga dusun paniisan. Salah satu promosi yang dilakukan selain berjualan langsung kepada konsumen adalah

melalui media *social Facebook* dan Aplikasi Tokopedia. Usaha konveksi baju muslim grosir ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama semenjak dipasarkan melalui media social. Karena dengan media social, konsumen dapat lebih cepat melihat beragam barang baru dari pengusaha konveksi baju muslim. "Seperti yang diutarakan salah satu penggerak potensi konveksi "Semenjak ramai media sosial kami mencoba promosi melalui Facebook dan Twitter, ternyata hasilnya lumayan banyak peminat dari luar kota yang dapat membeli/melihat profil bisnis konveksi." (Wawancara, 2016

Media *social facebook* sangat membantu bagi pengusaha konveksi karena dapat menampilkan informasi berupa deskripsi produk, kemitraan juga jangkauan pemasaran. Dengan media social juga dapat dimunculkan informasi bahwa produk unggulan konveksi ini merupakan produk dari wilayah Desa Parung Serab, sehingga konsumen dapat melihat potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Desa Parung Serab. Selain potensi kovenksi, potensi mebel juga mulai dipromosikan menggunakan media social, namun untuk potensi mebel peminat tidak sebanyak konvenksi karena kualitas dari potensi mebel di Desa Parung Serab belum sebaik mebel di wilayah lainnya. Berikut adalah gambar diagram batang perkembangan promosi potensi desa Parung Serab:



Sumber: Hasil Penelitian 2016

**Gambar 1.** Perkembangan Promosi Potensi Desa Parung Serab

Dengan adanya beberapa potensi yang sudah disebarluaskan melalui teknologi informasi online, merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan berbagai potensi desa parungserab ke dunia luar. Untuk mendukung peningkatan promosi potensi ini perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, karena promosi melalui teknologi informasi di Desa Parungserab sejauh ini hanya dilakukan oleh para generasi muda saja, sementara yang ikut terlibat dalam perkembangan potensi tersebut adalah semua elemen masyarakat.

Dan kegiatan pemberdayaan informasi tersebut seringkali dilakukan secara informal, tidak ada pemberitahuan atau laporan dari pengusaha, pengrajin terhadap perangkat Desa. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Parungserab bahwa "Pemberdayaan informasi untuk promosi potensi desa sebenarnya sudah dilakukan di beberapa bidang potensi desa, tetapi promosi tersebut baru dilakukan oleh para generasi muda, karena yang paham betul mengenai internet adalah generasi muda, sedangkan untuk yang sudah berusia banyak yang tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan teknologi untuk penyebarluasan informasi potensi desa". (wawancara, 2016) Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pendampingan mengenai cara penggunaan teknologi informasi kepada seluruh masyarakat Desa Parungserab serta perangkat desa Parungserab agar ke depan dapat ditingkatkan kembali pemberdayaan informasi kaitan dengan promosi potensi desa di wilayah Desa Parungserab.

Dengan adanya promosi potensi Desa Parung Serab dapat memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat, Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kegunaan teknologi informasi. Dengan menyadari akan manfaat teknologi informasi, maka diharapkan masyarakat akan mampu menyerap berbagai informasi penting sehingga pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan partisipatif yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan informasi mengenai potensi desa. *Kedua*, adanya kemudahan akses informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penyediaan informasi ini harus informatif dan tepat guna untuk masyarakat. Kegunaan informasi ini sebaiknya dapat dirasakan melalui peningkatan penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, informasi yang diberikan harus tepat sasaran, diolah dalam format yang sederhana agar mudah dimengerti dan dapat disebarkan dengan media komunikasi yang biasa digunakan, seperti papan pengumuman desa, brosur, pengeras suara, atau media teknologi informasi online yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Ketiga, untuk membangun kemitraan antara masyarakat dengan pengguna informasi. Kemitraan ini berguna untuk mengembangkan kemampuan masyarakat desa, seperti dengan intansi pemerintah dan konsumen untuk meningkatkan peluang bagi masyarakat desa.

Dalam konsep pembangunan kawasan perdesaan, komunikasi dan promosi potensi desa dapat berperan penting untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan perdesaan, dengan kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Karena salah satu faktor penting kesuksesan pembangunan adalah bagaimana penyediaan akses informasi pada masyarakat. Sehingga mereka dapat mencari pengetahuan-pengetahuan baru di berbagai media untuk mengembangkan masyarakatnya. Selain itu dalam pengembangan sistem informasi desa perlu mengedepankan konten informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Konten tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi perdesaan yang umumnya di sektor agraris.

Sarana prasarana desa parung serab dari mulai tempat peribadatan, kesehatan, pendidikan, olah raga kebutuhan listrik, kebutuhan air bersih juga sudah tersedia. Seperti tempat peribadatan, ada 22 Mesjid Jami di Desa Parung Serab, Sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Fasilitas jalan utama di Desa Parung Serab sudah bagus, walaupun satu tahun belakangan ini banyak digunakan untuk akses pembangunan, dilalui oleh kendaraan berat tetapi fasilitas jalan tetap baik. Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dalam 3 tahun terakhir sudah 70 rumah diperbaiki, dan untuk tahun 2016 target ada 24 rumah yang akan diperbaiki. Untuk fasilitas air bersih masih banyak wilayah di Desa Parung Serab yang masih kekurangan pasokan air terutama di musim kemarau, wilayah RW yang pasokan air nya sudah bagus hanya di wilayah RW 9, RW 4, RW 14, RW 15, RW 16. Untuk mengatasi kekurangan air, pemerintah desa Parung Serab sudah melakukan upaya membuat sibel aliran air bersih sebanyak 7 unit, mengoperasikan sumur dalam 150 meter dan membeli penyedot air yang dialirkan ke halaman rumah. Untuk kebutuhan listrik ada beberapa keluarga yang menggunakan listrik dari PLN dan membayar tagihan listrik secara resmi dengan ditandai bukti dari PLN dan ada juga keluarga yang menggunakan listrik selain dari PLN, seperti keluarga yang menyambung/ menyantol listrik dari keluarga lain, atau dari diesel dan generator, listrik yang diusahakan pemerintah dan listrik swadaya masyarakat.

Mengenai kerja keras, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan. Kerja keras dan gotong royong masyarakat desa Parung Serab sebenarnya sudah mulai luntur dibandingkan dengan sepuluh tahun ke belakang. Hal ini merupakan dampak dari pergeseran kondisi sosial masyarakat ditambah lagi dengan adanya peralihan masyarakat tradisional akibat pengambilan lahan Desa Parung serab yang mempengaruhi sebagian besar lapangan pekerjaan masyarakat Desa Parung Serab. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan salah satunya terlihat ketika kegiatan Musrenbangdes, aspirasi masyarakat disalurkan melalui perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, ulama, tokoh pendidikan, dengan mengikuti proses Musrenbangdes.

Dari mulai Kepala Desa yang mengirimkan surat untuk membahas usulan di Tingkat RT RW, kemudian ke tingkat desa. Di tingkat desa, usulan-usulan tersebut dipilah kembali berdasarkan kewenangan desa, swadaya masyarakat, APBDes, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Namun berdasarkan kroscek yang dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Parung serab, partisipasi masyarakat dalam musrenbang seringkali tidak tercantum pada hasil akhir Musrenbang, banyak usulan-usulan yang tidak terakomodir oleh Pemerintah Desa seperti yang diusulkan pada awal tahap Musrenbang tingkat RT RW. Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Desa masih belum optimal, hal ini tercermin dari prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat di tingkat desa tidak sepenuhnya menjadi prioritas dan muncul di APBD, sehingga hasil musrenbang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat Desa. Kurang optimalnya musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk mendukung pula adanya

pemberdayaan di masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat melenceng dari kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam partisipasi, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, kelompok tani, perempuan, termasuk masyarakat yang terlibat langsung dalam pengembangan potensi desa di berbagai bidang.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa, potensi desa bahkan aspirasi serta usulan-usulan dari masyarakat dalam pembangunan desa, layaknya diketahui oleh seluruh masyarakat desa Parung Serab. Hal ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perangkat Desa. Pemerintah Desa Parung Serab sebenarnya sudah ada keinginan untuk aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat namun ada kendala eksternal yang cukup mempengaruhi keterbukaan informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya pihak-pihak diluar masyarakat desa seperti LSM, dan wartawan yang selalu mengintimidasi mengenai kinerja Pemerintah Desa, hal ini cukup mempengaruhi keleluasaan Pemerintah Desa Parung Serab untuk mewujudkan keterbukaan informasi tersebut.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendesak sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan melindungi, melindungi disini adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi mandiri tidak tergantung pada pemberian pemerintah sehingga masyarakat merasa lebih aman dengan kerja keras dari potensi yang dimiliki. Yang terjadi saat ini di Desa Parung Serab, masyarakat masih memiliki ketergantungan dengan bantuan pemerintah, menganggap semua kegiatan atau usulan yang diajukan dapat dibantu oleh pemerintah. Ketika kenyataan tidak berkata demikian masyarakat berubah menjadi menyalahkan pemerintah Desa dan tidak percaya kepada pemerintah desa. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Parung Serab. "Masyarakat parung serab saat ini banyak membutuhkan pembimbingan, pelatihan dari pemerintah mengenai cara-cara mengembangkan potensi desa agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat desa"

Selain melindungi dari ketidakmandirian masyarakat desa, pemberdayaan juga melindungi masyarakat dari berbagai macam konflik yang terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Parung Serab, masyarakat desa Parung Serab sangat terkenal dengan masyarakat yang konflik sosialnya tinggi akibat dari karakter masyarakat yang dekat "Miras" Judi dan sebagainya, karakter seperti ini sering menimbulkan konflik sosial. Selain itu juga masalah sengketa tanah yang kerap terjadi di Desa Parung Serab.

Konflik-konflik seperti ini diselesaikan dengan dukungan dari perangkat Desa seperti Bidang Pemerintahan dan Bidang kesbanglinmas. Penyelesaian konflik dengan cepat sangat dibutuhkan bagi lingkungan masyarakat Desa Parung serab. Karena lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman, akan menumbuhkan iklim kerja sama, gotong royong yang baik yang selanjutnya dapat memajukan masyarakat desa.

Perlindungan dalam pemberdayaan tidak hanya mengenai perlindungan dari keamanan secara harfiah, tetapi juga keamanan secara finansial, yaitu bagaimana masyarakat Desa Parung Serab diberikan pembimbingan oleh pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya.

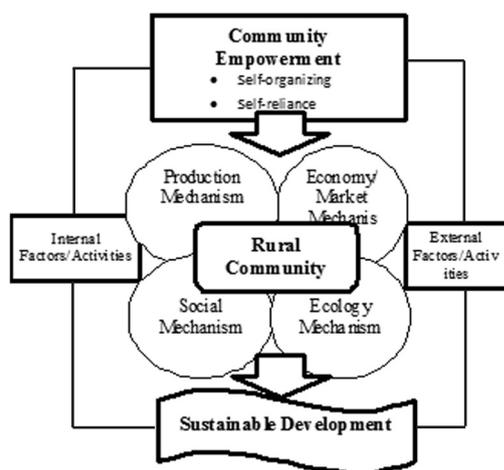
Yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Parung Serab diantaranya:

1. Peningkatan keterampilan produksi, mencakup pelatihan keterampilan dan penguasaan teknologi untuk memproduksi barang.
2. Peningkatan keterampilan pemasaran, mencakup pelatihan keterampilan pemasaran dan menjual hasil produksi.
3. Penguatan kelembagaan sosial ke-masyarakatan, mencakup pemberantasan buta aksara, pemberian beasiswa, peningkatan pelayanan pendidikan, penyuluhan keterampilan usaha, peningkatan wawasan kepedulian dan peningkatan kapasitas sosial lainnya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait dengan faktor internal dan eksternal. dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu bentuk *self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin yang dapat menggerakkan potensi masyarakat dan membantunya untuk memberikan keilmuan tentang bagaimana mereka dapat *menshare* kegiatannya, budayanya, dan informasi-informasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat melalui berbagai macam bentuk baik kegiatan maupun media. Tim pendamping ini merupakan salah satu eksternal faktor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

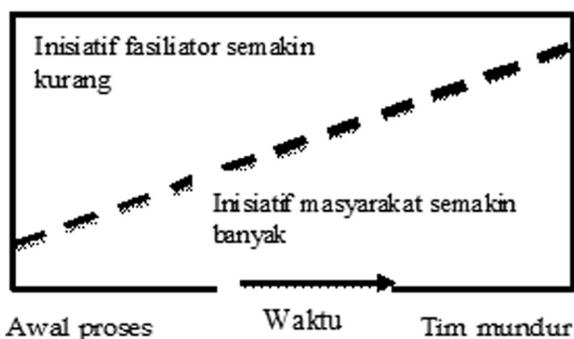
Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu pemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa tim fasilitator dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi.



**Gambar 2.** Proses dan Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan Sustainable Development (Subejo dan Supriyanto, 2005).

Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penasihat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat. Secara skematis, mekanisme pembagian peran menurut periode antara tim dan kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 3.** Proses Pembagian Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat (Subejo dan Supriyanto, 2005).

Lebih lanjut, Subejo dan Supriyanto (2005) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu diorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chamber dalam Anholt (1992) sering dikenal dengan semboyan “*put the farmers first*”.

Menurut Nasikun (2000) dalam Subejo dan Supriyanto (2005), terkait dengan paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-

tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilihan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh beberapa komponen atau aspek kunci, sebagaimana dicatat oleh Subejo dan Supriyanto (2005).

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagi pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Selaras dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan sebagai telah dikemukakan tersebut, tahapan kegiatan pemberdayaan dapat dibagi menjadi berbagai tahapan, yaitu:

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja: sebelum melakukan kegiatan penetapan wilayah kerja perlu memperoleh kesepakatan antara tim fasilitator, aparat pemerintah setempat, (perwakilan) masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan yang lain (pelaku bisnis, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, dll.). Hal ini tidak saja untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan, tetapi justru untuk membangun sinergi dan memperoleh dukungan berupa partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, demi keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.
2. Sosialisasi kegiatan: yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Termasuk dalam sosialisasi kegiatan, perlu juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasi/keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan.

3. Penyadaran masyarakat: dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial budaya, ekonomi dan politik. Termasuk dalam penyadaran adalah:
  - a. Bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
  - b. Melakukan analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan.
  - c. Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumber daya yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan, dll.) yang diperlukan.
4. Pengorganisasian masyarakat: termasuk pemilihan pemimpin dan kelompok-kelompok tugas (*task group*) yang akan dibentuk. Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan, karena untuk melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah dan atau memperbaiki keadaan seringkali tidak dapat dilakukan secara individual (perorangan), tetapi memerlukan pengorganisasian masyarakat termasuk dalam pengorganisasian adalah: pembagian peran dan pengembangan jejaring kemitraan.
5. Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan pelatihan terkait dengan informasi dan bagaimana mempublikasikan informasi tersebut.
6. Advokasi kebijakan: karena semua upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparatur pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, dll.).

7. Politisasi: dalam arti terus-menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat.

#### D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat desa Parungserab dalam promosi potensi desa dapat dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun yang terjadi saat ini pengembangan promosi potensi desa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, upaya dari perangkat desa Parungserab untuk mengenalkan potensi desa ternyata belum cukup membuat masyarakat pro aktif dalam pengembangan potensi desa. Kedua, sebagian masyarakat sudah mulai memanfaatkan media teknologi dalam promosi potensi desa tetapi hanya dilakukan oleh generasi muda saja. Ketiga, pendampingan dan pelatihan mengenai cara atau teknik promosi potensi desa dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan pengetahuan mereka.

##### REKOMENDASI

Dengan bertambahnya antusias masyarakat untuk mempromosikan potensi desa diperlukan pendampingan dari sekelompok tim yang khusus mendampingi masyarakat dalam proses peningkatan kemampuan promosi potensi desa dengan media teknologi. Tahap awalnya dapat bersama-sama dengan tim fasilitator berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, dan menjadikan seluruh aktivitas dan nilai-nilai,

benda-benda yang dimiliki masyarakat tersebut menjadi sebuah bahan informasi.

Setelah terkumpul tahap awal, masyarakat akan dibantu untuk mengemas informasi itu agar menarik bahkan memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Seperti salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini untuk.

Tahap selanjutnya adalah menginformasikan informasi-informasi promosi desa yang sudah dikemas semenarik mungkin untuk disebarkan melalui media apapun yang mampu mengakses keberadaan mereka. Sehingga informasi ini dapat diterima oleh masyarakat luar dan juga pemerintah yang dalam hal ini berguna untuk menyusun kebijakan bagi masyarakat itu sendiri.

## REFERENSI

- Aditya, T. 2009. *Teori Pemberdayaan dan Advokasi*. <http://id.teguh.web.id/>.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*. Bandung: Alfabeta.
- Asang, Sulaiman. 2012. *Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas Perspektif Organisasi Publik*. Surabaya: Brillan Internasional.
- Bintarto, R. 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia.
- Dharmawan, A.H. 2000. *Poverty, Powerlessness, and Poor People Empowerment: A Conceptual Analysis with Special Reference to the Case of Indonesia. Paper Presented in the Workshop on Rural Institutional Empowerment held in the Indonesian Consulate General of the Republic of Indonesia in Frankfurt am Main Germany, August 26th 2000*.
- \_\_\_\_\_.2006. *Pendekatan-pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer Makalah disampaikan pada "Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah bagi Tenaga Pemandu Teknologi Pendukung Prima Tani", di Cisarua Bogor, 19-25 November 2006*.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Hacker, H. 1999. *Empowerment Projects for and by Woman: Summary of Pilot Study*. DED Yaounde. (Unpublished).
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Zulkarnain. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press.
- Osmani, S.R. 2000. *Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty Reduction. SEPED Conference Paper Series No 7*. UNDP. Washington, D.C.
- Pranarka. A.M.W dan Vidhyandika. 1996. *"Pemberdayaan (Empowerment)" Dalam Onny Prijono dan Pranarka (ed), Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Schneider, H.1999. *Participatory Governance: The Missing Link for Poverty Reduction*. OECD Development Centre, Policy Brief No. 17 Paris.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima, dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Subejo dan Supriyanto. 2005. *Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian* No. 1 Juli (2005). 17-32.
- Sudriamunawar, Haryono. 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Soerjono, Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taneko, L Soleman. 1984. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Tri, Winarni. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi*
- Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Weissberg, R. 1999. *The Politics of Empowerment*. Praeger. Westport, Connecticut and London.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.